



LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
BNN KOTA SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenanan-Nya lah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BNN Kota Surakarta Tahun 2023 ini dapat diselesaikan. Penyusunan LAKIP ini dilakukan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang berdayaguna dan berhasil guna berdasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance* sebagai usaha untuk mewujudkan demokratisasi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang menjadi tugas pemerintah saat sekarang ini.

Hal ini merupakan suatu prasyarat dalam penyusunan mekanisme program, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian pembangunan. Untuk itu diperlukan suatu alat ukur yang mana diharapkan bisa menjawab tantangan pembangunan dimasa depan yang semakin dinamis, yang dimulai dari Unit / Instansi yang ada dalam pemerintahan itu sendiri. Visi dan misi yang dalam penilaiannya harus sesuai dengan tugas yang diemban oleh instansi pemerintah dan diharapkan dapat dibuktikan dalam uraian tugas secara terukur serta dapat dipertanggung jawabkan melalui Perencanaan Strategis (Renstra), Penetapan Kinerja (PK) maupun Evaluasi Kinerja Kegiatan

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dari semua pihak. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BNN Kota Surakarta tahun 2023 ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Surakarta, 31 Desember 2023
**Kepala Badan Narkotika Nasional
Kota Surakarta**

David H. Mutapea

DAFTAR ISI

KA KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan.....	2
D. Struktur Organisasi	4
E. Sistematika Penyajian.....	5
BAB II PERJANJIAN KINERJA	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	8
A. Capaian Kinerja Organisasi	8
B. Realisasi Anggaran.....	51
BAB IV PENUTUP	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang melanda dunia berimbas juga ke tanah air, perkembangannya begitu pesat sehingga sangat mengkhawatirkan. Narkoba juga sudah menyebar sampai ke pelosok pedesaan dan telah mengorbankan ribuan bahkan jutaan jiwa anak bangsa akibat terjerat narkoba. Berdasarkan data yang ada di BNN, tidak satu Kabupaten/Kota di Indonesia yang terbebas dari masalah narkoba.

Narkoba dan obat-obatan psikotropika sudah merambah ke segala lapisan masyarakat Indonesia. Yang menjadi sasaran bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus, ke sekolah-sekolah, rumah kost, dan bahkan di lingkungan rumah tangga.

Dalam rangka mewujudkan Indonesia bebas dari penyalahgunaan narkoba, BNN menyebar sampai tingkat wilayah provinsi bahkan kabupaten/kota di Indonesia. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) adalah instansi vertikal BNN yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota.

Strategi yang dilakukan oleh BNN Kota Surakarta dalam upaya perlawanan terhadap kejahatan Narkoba melalui Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Rehabilitasi.

Pencegahan melalui Diseminasi Informasi dan Advokasi, Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Peran Serta Masyarakat, Rehabilitasi melalui Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah, Komponen Masyarakat.

Dengan berakhirnya tahun anggaran 2023, BNN Kota Surakarta sebagai lembaga pemerintah yang telah menggunakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN),

berkewajiban melaporkan kinerja kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui BNN RI.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNN Kabupaten/Kota. Hal tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

C. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan

1. Kedudukan

Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta adalah Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang

melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional di Kota Surakarta.

2. Tugas

- a. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- b. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- c. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
- d. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- e. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- f. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- g. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

3. Fungsi

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi, dan Pemberantasan;
- b. Pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama;
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada Lingkungan Pemerintah, Pendidikan, Swasta dan Masyarakat;
- d. Penyusunan rencana program dan anggaran BNNK;
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan BNNK;
- f. Pelayanan administrasi BNNK.

4. Kewenangan

Kewenangan Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta secara implisit pada tugasnya, namun kewenangan yang dikhususkan oleh Undang-Undang adalah tugas dalam melaksanakan pemberantasan jaringan sindikat Narkoba, BNN Kota Surakarta berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan di daerah.

D. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi sebagaimana disebut dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional. Adapun struktur organisasi BNN Kota Surakarta adalah sebagai berikut :

1. Kepala BNN Kota Surakarta : David HA Hutapea
2. Kepala Subbag Umum : Masriya Kumala
3. Ketua Tim Kerja P2M : Sri Nurlyani
4. Ketua Tim Kerja Rehabilitasi : Indri Setyorini
5. Ketua Tim Kerja Pemberantasan : Arga Adhitya Wardhana

STRUKTUR ORGANISASI BNN Kota Surakarta



E. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di bidang P4GN ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab IV Penutup

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja

2. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Guna mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasara strategis peningkatan penanganan Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di BNN maka ditetapkan Perjanjian Kinerja BNN di masing-masing BNN Kabupaten/Kota Tahun 2023 adapun untuk Perjanjian Kinerja BNN Kota Surakarta adalah sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Kementerian/Lembaga : BNN Kota Surakarta

Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Anak dan Remaja	53,00
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Faktor Risiko Penyalahgunaan Narkoba	78,69
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,25

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t
1	2	3	4
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba	Persentase Penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	70%
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang
6.	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga
7.	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah unit penyelenggaraan layanan IBM yang operasional	2 unit
6	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	3,4
7	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	1 Berkas
8	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Surakarta	92
9	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Surakarta	92

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja BNN Kota Surakarta merupakan implementasi dari perjanjian kinerja yang telah disepakati oleh seluruh pejabat pemangku program dengan Kepala BNN untuk mencapai sasaran strategis, secara *cascading* turun hingga ke level bawah di BNN Kabupaten/Kota di jajarannya.

Sasaran strategis yang dicapai merupakan hal yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik, apakah program dan kegiatan yang dilakukan memiliki *benefit* (manfaat) kepada masyarakat.

Dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Surakarta Tahun 2023 ditetapkan 10 (sepuluh) sasaran strategis yang akan dicapai, dengan indikator kinerja kegiatan sebanyak 11 (sebelas) indikator. Dari 11 (sebelas) indikator kinerja kegiatan tersebut dapat disimpulkan **6 (enam) indikator kinerja kegiatan melebihi target dan 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan sesuai target, dan 2 (dua) indikator kurang dari target.** Berikut ini dijelaskan realisasi pencapaian 10 (sepuluh) sasaran strategis tahun 2023 dan penjelasan hasil capaian 11 (sebelas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagaimana tabel di bawah ini :

INDIKATOR KINERJA BNN KOTA SURAKARTA 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Diri Anak dan Remaja	53,00	50,13	94,58%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Faktor Risiko Penyalahgunaan Narkoba	78,69	91,696	116,53%
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,25	3,42%	105,23%
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase Penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	70%	83,33%	119,05%
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	10	100%
6.	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga	6	600%
7.	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggaraan layanan IBM yang operasional	2 unit	2	100%
8.	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	3,4	3,67	107,94%
9.	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1 Berkas	1	100%
10.	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Surakarta	92	86,36	93,86%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
11.	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Surakarta	92	96,11	104,4%

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan BNN Kota Surakarta selama kurun waktu tahun 2023, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian, baik dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik.

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
-------------------------	---

Sasaran Kinerja di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Indeks Ketahanan Diri Anak dan Remaja	53,00	50,13 (Tinggi)	94,58%

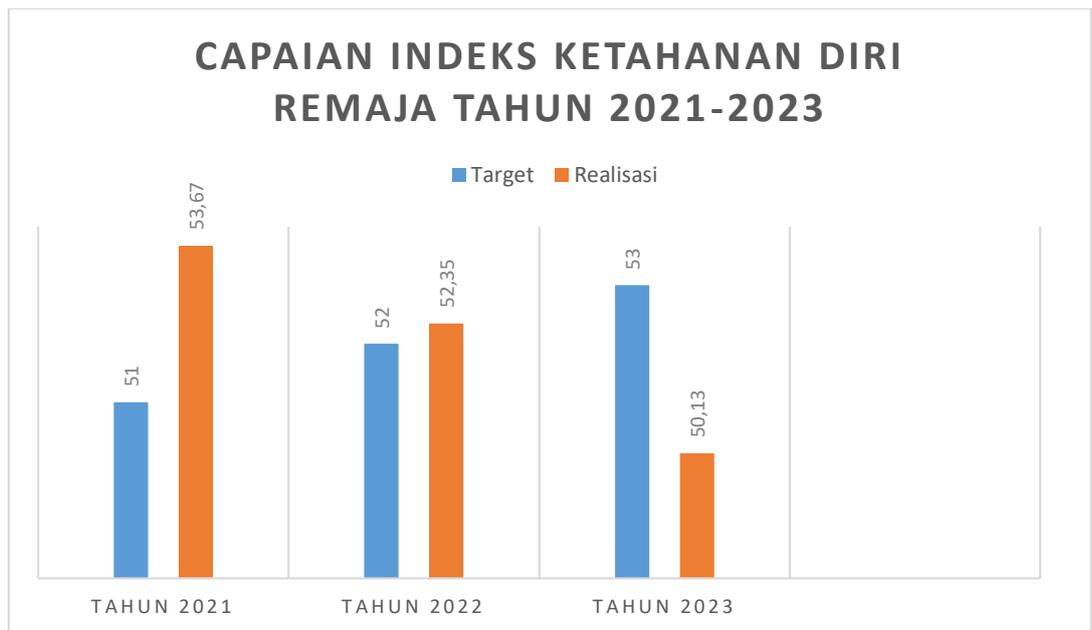
Definisi operasional: Ketahanan Diri Anti Narkoba pada Remaja merupakan kemampuan remaja untuk mengendalikan diri, menghindari dari dan menolak segala bentuk penyalahgunaan Narkoba.

Metode pengukuran menggunakan kuesioner Indeks Ketahanan Diri Anti Narkoba (*Anti Drug Scale/ADS*) sebanyak 47 pertanyaan dan 28 pertanyaan prediktor dengan kriteria yaitu :

- a. Sangat Tinggi
- b. Tinggi

- c. Rendah
- d. Sangat Rendah

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 53 terealisasi dengan skor sebesar 50.13 (persentase 94,58%), dapat masuk dalam kategori tinggi. Dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dan 2022, indeks ketahanan diri remaja terlihat mengalami penurunan seperti dapat dilihat pada grafik berikut:



Output Indeks Ketahanan diri Remaja ini, diperoleh dari kegiatan yang termasuk dalam Pengelolaan Informasi dan Edukasi yakni Kegiatan penyebaran informasi melalui berbagai media (konvensional/talkshow, penyiaran, elektronik, cetak, luar ruang dll) dan pembentukan remaja teman sebaya.

NO	KEGIATAN	OUTPUT	JUMLAH SEBARAN	KET
1.	Dialog Interaktif Remaja (5 Output)	Remaja teman sebaya yang terbentuk	10 orang	DIPA
2.	Informasi dan Edukasi Melalui Talkshow (1 Output)	Mahasiswa	70 orang	DIPA

3.	Informasi dan Edukasi Melalui Kampanye/Pagelaran Seni (1 Output)	Pelajar	100 orang	DIPA
4.	Informasi dan Edukasi Melalui Insert Konten (3 Output)	ASN Pemkot Surakarta, Masyarakat dan Mahasiswa	2.430 orang	DIPA
5.	Informasi dan Edukasi Melalui Pemanfaatan Media Luar Ruang (Pemasangan Spanduk) (1 Output)	Pengendara yang terpapar informasi	4.250 kendaraan	DIPA
6.	Informasi dan Edukasi Melalui Placement Radio Lokal (1 Output)	Pendengar radio dari masyarakat yang terpapar informasi	43.200 pendengar	DIPA
7.	Sosialisasi tatap muka (konvensional)	Jumlah masyarakat yang terpapar informasi	28.924 orang	Non Dipa
8.	Penayangan konten media sosial IG, youtube, fb	Pengguna internet yang terpapar informasi	15.956 Followers/Subcriber/viewer	Non Dipa
9.	Sosialisasi melalui media elektronik (radio)	Pendengar radio dari masyarakat yang terpapar informasi	750 pendengar	Non Dipa

Formula yang digunakan untuk mengukur pada indikator kinerja kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi adalah sebagai berikut:

- Terlaksana 5x dialog interaktif remaja
- Terlaksana 1 output talkshow
- Terlaksana 1 output kampanye/pagelaran seni
- Terlaksana 3 output insert konten
- Terlaksana 1 output penyiaran radio (iklan)
- Terlaksana 1 output pemasangan media cetak luar ruang (spanduk)

Kendala :

Remaja yang diberi pelatihan hanya 10 orang tetapi responden yang diukur indeks ketahanan diri remaja sebanyak 100 orang. Hal ini kemungkinan mempengaruhi hasil kuesioner karena aspek pengetahuan dan sikap peserta yang mendapat pelatihan remaja teman sebaya lebih mendalam atau lebih baik dibandingkan dengan yang hanya mendapat sosialisasi bahaya narkoba saja.

Data sekunder dan data dependen sebagai komponen perhitungan Indeks Dektari adalah real kondisi di lapangan/*locus* kegiatan sebelum dilakukan intervensi (penyuluhan dll).

Target nilai yang ditentukan meningkat setiap tahun padahal sasaran yang diukur berbeda.

Proses mencari peserta cukup lama karena remaja yang memenuhi kriteria di wilayah kelurahan bersinar tidak banyak dan ketika sudah dapat belum tentu memiliki komitmen.

Strategi :

Dari 10 orang remaja teman sebaya yang sudah dilatih, masing-masing orang diminta untuk membuat program kegiatan/sosialisasi baik secara online maupun offline dan mencari 10 orang untuk mengikuti kegiatan tersebut serta berkoordinasi dengan SMA/SMK yang berada di zonasi Kelurahan Bersinar untuk membantu mencari peserta yang sesuai kriteria di Kelurahan Bersinar.

SASARAN KEGIATAN	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
-------------------------	--

Sasaran Kinerja di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
2.	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Faktor Risiko Penyalahgunaan Narkotika	78,69	91,696 (sangat Tinggi)	116,53%

Definisi operasional: Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika merupakan kemampuan keluarga untuk meningkatkan daya tangkal dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

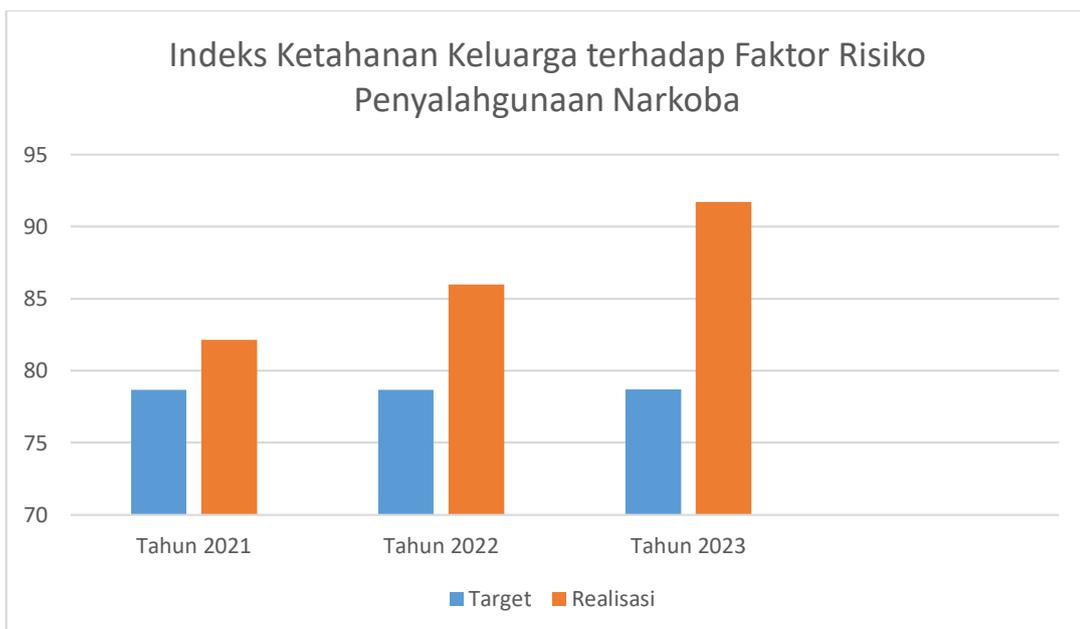
Metode pengukuran menggunakan kuesioner Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba yang ditujukan bagi 5 (lima) keluarga terpilih dari 10 (sepuluh) keluarga yang di intervensi dengan kriteria yaitu:

- a. Sangat Tinggi
- b. Tinggi

c. Rendah

d. Sangat Rendah

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 78,69 persentase 116,53% dapat terealisasi dengan skor sebesar 91,696 termasuk dalam kategori sangat tinggi. Apabila dibandingkan dengan periode tahun 2021 dan 2022, Indeks Ketahanan Keluarga terhadap faktor risiko penyalahgunaan narkoba cenderung mengalami kenaikan seperti dapat dilihat dalam grafik berikut:



Indeks Ketahanan Keluarga merupakan Output dari Penyelenggaraan Advokasi yang dilaksanakan selama tahun 2023 dengan hasil terlaksananya program ketahanan keluarga anti narkoba dengan sasaran 5 keluarga di Kelurahan Setabelan dan 5 keluarga di Kelurahan Sudiroprajan serta terbentuk 2 (dua) Kelurahan Bersinar di Tahun 2023 dengan penjabaran sebagai berikut:

- Kegiatan Intervensi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba dilaksanakan sebanyak 4 kali.
- Kegiatan Intervensi Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa/Kelurahan dilaksanakan di 2 kelurahan bersinar yaitu Kelurahan Setabelan dan Kelurahan Sudiroprajan.

- Formula yang digunakan untuk mengukur pada indikator kinerja kegiatan Penyelenggaraan Advokasi adalah sebagai berikut:
 - b. Telah melaksanakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba.
 - c. Telah melaksanakan Koordinasi dalam Rangka Pengayaan Referensi Advokasi di BNNP.
 - d. Telah melaksanakan Intervensi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba.
 - e. Telah melaksanakan Rapat Persiapan Dalam Rangka Fasilitasi Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Keluarga Berbasis Sumberdaya Pembangunan Desa.
 - f. Telah melaksanakan Rapat Koordinasi Dalam Rangka Pelaksanaan Fasilitasi Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumberdaya Pembangunan Desa.
 - g. Telah melaksanakan Fasilitasi dan Asistensi Pelaksanaan Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumberdaya Pembangunan Desa.
 - h. Telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Fasilitasi Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa.

Kendala :

- Pada Intervensi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba mengalami kendala diantaranya :
 - a. Kegiatan Intervensi baru dilaksanakan di bulan September dikarenakan awalnya akan dikolaborasikan dengan kegiatan Deputi Pencegahan namun tidak dapat terlaksana sehingga kembali ke rencana awal melaksanakan kegiatan secara mandiri.
 - b. Kesulitan dalam pemilihan peserta anak dikarenakan jumlah anak di Kelurahan Setabelan yang berada pada kelas VII sangat sedikit sehingga perlu berkoordinasi dengan SMP

- yang berada di wilayah Kelurahan Setabelan untuk membantu dalam pemilihan peserta.
- c. Komitmen peserta dalam mengikuti kegiatan kurang.
 - d. Peserta minta ada pemaparan materi secara menyeluruh terkait tema dan kegiatan tidak hanya berupa game atau penugasan.
- Pada Pelaksanaan Program Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber Daya Desa mengalami kendala:
 - a. Belum adanya penganggaran khusus P4GN dari Kelurahan untuk program Kelurahan Bersinar di tahun ini;
 - b. Belum ada kegiatan inisiasi dari Kelurahan dan Masyarakat di luar kegiatan dari BNNK Surakarta;
 - c. Agen Pemulihan (AP) masih belum optimal dalam menjaring klien rehabilitasi;
 - d. Belum adanya sinergitas dengan pukesmas setempat dan stakeholder di wilayah.

Strategi :

- a. Merekomendasikan untuk memaksimalkan kegiatan P4GN dengan menyisipkan kegiatan P4GN pada kegiatan yang sudah ada (*insert konten*).
- b. Koordinasi intensif ke instansi sasaran untuk menjalin sinergitas dalam mensukseskan program Kelurahan Bersinar.

SASARAN KEGIATAN	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN.
-------------------------	---

Sasaran Kinerja di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
3.	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,25	3,42 (Sangat Mandiri)	105,23%

Definisi Operasional dari Indeks Kemandirian Masyarakat digunakan untuk mengukur partisipasi dari suatu lembaga dalam P4GN. Pengukuran berdasarkan aspek Sumber Daya Manusia, Metode, Anggaran, Sistem, Sarana Prasarana, dan Kegiatan P4GN.

Capaian pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dihitung dari jumlah instansi/lingkungan yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba. Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba meliputi beberapa tahapan kegiatan yaitu Rapat Kerja, Workshop/Bimbingan Teknis, Tes Urine, Monitoring, dan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat. Dengan target di 2 (dua) instansi yaitu Instansi Pemerintah dan Lingkungan Pendidikan. Namun program kegiatan juga dilaksanakan di Lingkungan Masyarakat dan Dunia Usaha.

1. Instansi Pemerintah

NO	KEGIATAN	OUTPUT	JUMLAH PESERTA	KET
1.	Rapat Kerja Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba	Terpaparnya 15 instansi tentang program P4GN dan terpetakannya calon penggiat P4GN	15 Instansi	BKPSDM, Bakesbangpol, DP3AP2KB, Diskominfo SP, Dinkes, DLH, Dispar, Dinkop UKM, Satpol PP, Kec. Jebres, Kec. Laweyan, Kec. Banjarsari, Kec. Pasar Kliwon, Kec. Serengan, KONI
2.	Audiensi dengan Stakeholder Dalam Rangka Pemetaan Pemberdayaan Masyarakat	Terkoordinasikan Program Pemberdayaan Masyarakat ke Instansi Pemerintah dan rekomendasi calon penggiat P4GN	2 Instansi	KONI, BKPSDM
3.	Bimbingan Teknis Penggiat P4GN	Terbentuknya penggiat di instansi pemerintah	2 instansi	Satpol PP dan KONI
4.	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Tes Urine	Terwujudnya lingkungan kerja bersih narkoba	808 orang	Dipa = 265 Non Dipa = 543

5.	Workshop Penggiat P4GN	Penggiat P4GN Tahun 2022 yang mendapat pembinaan lanjutan	8 instansi	BKPSDM, Bakesbangpol, DP3AP2KB, Diskominfo SP, Dinkes, DLH, Dinkop UKM, Kel. Purwosari.
6.	Monitoring Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat	Hambatan dalam implementasi rencana aksi penggiat P4GN dan terkumpulnya IKP tahun 2023	10 Instansi	KONI, Satpol PP, DLH, Kel. Purwosari, Diskominfo SP, Dinkes, BKPSDM, Bakesbangpol, DP3AP2KB, Dinkop UKM
7.	Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat	Hasil evaluasi pelaksanaan aksi penggiat P4GN dan evaluasi hasil perhitungan IKP	10 Instansi	KONI, Satpol PP, DLH, Kel. Purwosari, Diskominfo SP, Dinkes, BKPSDM, Bakesbangpol, DP3AP2KB, Dinkop UKM
8.	Rapat Koordinasi Pengembangan dan Pembinaan Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba	Tersampainya a program KOTAN kepada pemerintah daerah dan stakeholder terkait	24 Instansi	Bappeda, Bakesbangpol, Satpol PP, Bagian Hukum Pemkot Surakarta, BKPSDM, Pengadilan Negeri, Satres Narkoba, Kejaksaan Negeri, Camat Jebres, Camat Laweyan, Camat Banjarsari, Camat Pasar Kliwon, Kec. Serengan, Lurah Sudiroprajan dan Lurah Setabelan, Dinsos, Diskominfo SP, Dinsnaker, Dinkop UKM Perin, Cabdin PendiDikan Wilayah VII, Kantor Kemenag SKA, Dinkes, DP3AP2KB, PKK Surakarta, Polsek Banjarsari, Polsek Jebres, Koramil Banjarsari, Koramil Jebres
9.	Asistensi Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba	Tersinerginya program P4GN dengan kegiatan di stakeholder dalam mewujudkan KOTAN	8 instansi	DPRD, Kodim 0735/Surakarta, Kec. Banjarsari, Satres Narkoba, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Bakesbangpol, Kec. Jebres
10.	Workshop Tematik P4GN	Terbentuk agen of change dalam upaya P4GN untuk meningkatkan indeks KOTAN	13 Instansi	Linmas dari 13 Kelurahan Bersinar

11.	Konsolidasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba Pada Sektor Kelembagaan	Terwujudnya komitmen dan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan KOTAN berupa upaya pembentukan regulasi dan kolaborasi program kegiatan	20 instansi	Bappeda, Bakesbangpol, Satpol PP, Bagian Pemerintah Pemkot Surakarta, Dinas Kesehatan, DP3AP2KB, BKPSDM, PKK Kota, Dispora, Satres Narkoba, Kecamatan Jebres, Kec. Banjarsari, Lurah Sudiroprajan dan Lurah Setabelan, Dinsos, Diskominfo SP, Dinsnaker, Dinas Pendidikan, Cabdin Pendidikan Wilayah VII, Satbinmas
12.	Pengumpulan Data Indeks Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba	Indeks Kota Tanggap Ancaman Narkoba	8 instansi	DPRD, Kodim 0735/Surakarta, Kec. Banjarsari, Satres Narkoba, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Bakesbangpol, Kec. Jebres

2. Lingkungan Pendidikan

NO	KEGIATAN	OUTPUT	JUMLAH PESERTA	KET
1.	Rapat Kerja Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba	Terpaparnya Instansi pendidikan tentang Program P4GN dan terpetakannya calon penggiat P4GN	8 Instansi	Dinas Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII, Kantor Kemenag Surakarta, ISI, UNIBA, USB, Poltek Indonusa, Universitas Duta Bangsa
2.	Audiensi dengan Stakeholder Dalam Rangka Pemetaan Pemberdayaan Masyarakat	Terkoordinasikan Program Pemberdayaan Masyarakat ke Lingkungan Pendidikan	1 Instansi	Dinas Pendidikan
3.	Bimbingan Teknis Penggiat P4GN	Terbentuknya penggiat di Lingkungan Pendidikan	11 Instansi	ISI, UNIBA, MAN 1 SKA, MTsN 2 SKA, SMPN 27 SKA, SMPN 7 SKA, SMPN 21 SKA, SMPN 3 SKA, SMPN 17 SKA, SMK MANDALA BHAKTI, SMK BATIK 2 SKA
4.	Workshop Penggiat P4GN	penggiat P4GN Tahun 2022 yang telah mendapatkan pembinaan lanjutan	2 Instansi	Politeknik Indonusa dan Universitas Setia Budi
5.	Monitoring Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat	Hambatan dalam implementasi rencana aksi penggiat P4GN dan terkumpulnya IKP tahun 2023	12 Instansi	SMPN 27 SKA, SMK Batik 2 SKA, MTs N 2 SKA, MAN 1 SKA, SMK MANDALA BHAKTI, UNIBA, SMPN 7 SKA, ISI, SMPN 3 SKA, SMPN 17 SKA, INDONUSA, USB

6.	Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat	Hasil evaluasi pelaksanaan aksi penggiat P4GN dan evaluasi hasil perhitungan IKP	12 instansi	SMPN 27 SKA, SMK Batik 2 SKA, MTs N 2 SKA, MAN 1 SKA, SMK MANDALA BHAKTI, UNIBA, SMPN 7 SKA, ISI, SMPN 3 SKA, SMPN 17 SKA, INDONUSA, USB
7.	Rapat Koordinasi Pengembangan dan Pembinaan Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba	Tersampainya program KOTAN di lingkungan pendidikan dan adanya dukungan program	3 Instansi	Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII dan Kantor Kemenag Kota Surakarta
8.	Asistensi Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba	Tersinerginya program P4GN dengan kegiatan di stakeholder dalam mewujudkan KOTAN	2 instansi	SDN Sampangan dan SMPN 21 Surakarta
9.	Workshop Tematik P4GN	Terbentuk agen of change dalam upaya P4GN untuk meningkatkan indeks KOTAN	40 Pelajar	SMA/SMK di Kota Surakarta
10.	Pengumpulan Data Indeks Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba	Terumpulnya data untuk perhitungan IKOTAN 2023	4 instansi pendidikan	SDN Sampangan, SMPN 21 SKA, SMAN 1 SKA, UNISRI

3. Lingkungan Masyarakat

NO	KEGIATAN	OUTPUT	JUMLAH PESERTA	KET
1.	Rapat Kerja Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba	Terpaparnya kelompok masyarakat tentang Program P4GN dan terpetakannya calon penggiat P4GN	7 Instansi	IPNU, IPPNU, IP, PMS, PMI, PSR PMI, GERAM
2.	Audiensi dengan Stakeholder Dalam Rangka Pemetaan Pemberdayaan Masyarakat	Terkoordinasikan Program Pemberdayaan Masyarakat ke Lingkungan Masyarakat	2 Instansi	Kelurahan Sudiroprajan dan Kelurahan Setabelan
3.	Bimbingan Teknis Penggiat P4GN	Terbentuknya penggiat di Lingkungan Masyarakat	10 Instansi	IPNU, IPM, PMI, TSR PMI, Kel. Sudiroprajan, Kel. Setabelan, Kel. Tipes, Kel. Sondakan, Kel. Gandekan, Kel. Pucangsawit

4.	Workshop Penggiat P4GN	penggiat P4GN tahun 2022 yang telah mendapat pembinaan lanjutan	1 Instansi	PMS, Kel. Gilingan, Kel. Timuran, Kel. Joyotakan, Kel. Semanggi, Kel. Baluwarti, Kel. Jebres
5.	Monitoring Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat	Hambatan dalam implementasi rencana aksi penggiat P4GN dan terkumpulnya IKP tahun 2023	15 Instansi	Kel. Sondakan, Kelurahan Gandekan, Kelurahan Pucangsawit, IPM, IPNU, Kel. Sudiroprajan, PMI, Kel. Setabelan, Kel. Tipes, Kel. Semanggi, Kel. Joyotakan, Kel. Gilingan, Kel. Baluwarti, Kel. Timuran, Kel. Jebres.
6.	Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat	Hasil evaluasi pelaksanaan aksi penggiat P4GN dan evaluasi hasil perhitungan IKP	15 Instansi	Kel. Sondakan, Kelurahan Gandekan, Kelurahan Pucangsawit, IPM, IPNU, Kel. Sudiroprajan, PMI, Kel. Setabelan, Kel. Tipes, Kel. Semanggi, Kel. Joyotakan, Kel. Gilingan, Kel. Baluwarti, Kel. Timuran, Kel. Jebres.
7.	Rapat Koordinasi Pengembangan dan Pembinaan Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba	Tersampainya program KOTAN di lingkungan pendidikan dan adanya dukungan program	3 Instansi	Kelurahan Sudiroprajan dan Kelurahan Setabelan, PKK Kota Surakarta
8.	Asistensi Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba	Tersinerginya program P4GN dengan kegiatan di stakeholder dalam mewujudkan KOTAN	2 instansi	PKK Kelurahan Setabelan dan PKK Kelurahan Sudiroprajan
9.	Pengumpulan Data Indeks Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba	Terkumpulnya data untuk perhitungan IKOTAN 2023	2 Wilayah	Warga Kel. Setabelan dan Warga Kel. Sudiroprajan

4. Lingkungan Dunia Usaha

NO	KEGIATAN	OUTPUT	JUMLAH PESERTA	KET
1.	Rapat Kerja Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba	Terpaparnya Lingkungan Dunia Usaha tentang Program P4GN dan terpetakannya calon penggiat P4GN	5 Instansi	PT. KAI, PT. Angkasa Pura II dan Radio Solopos FM, Solo Radio FM, Metta FM Surakarta
2.	Audiensi dengan Stakeholder Dalam Rangka Pemetaan Pemberdayaan Masyarakat	Terkoordinasikan Program Pemberdayaan Masyarakat ke Lingkungan Dunia usaha	1 instansi	Radio Solopos FM
3.	Bimbingan Teknis Penggiat P4GN	Terbentuknya penggiat di Lingkungan Dunia Usaha	3 Instansi	PT. KAI, Solopos FM, Metta FM
4.	Workshop Penggiat P4GN	Penggiat P4GN tahun 2022 telah mendapat pembinaan lanjutan	2 Instansi	PT. Angkasa Pura II dan Solo Radio
5.	Monitoring Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat	Hambatan dalam implementasi rencana aksi penggiat P4GN dan terkumpulnya IKP tahun 2023	5 Instansi	Metta FM, Solopos FM, PT. KAI, Solo Radio FM, PT. Angkasa Pendidikan
6.	Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat	Hasil evaluasi pelaksanaan aksi penggiat P4GN dan evaluasi hasil perhitungan IKP	5 Instansi	Metta FM, Solopos FM, PT. KAI, Solo Radio FM, PT. Angkasa Pendidikan
7.	Asistensi Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba	Tersinerginya program P4GN dalam mewujudkan KOTAN	2 instansi	PT. KAI, Shopee
9.	Pengumpulan Data Indeks Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba	Terkumpulnya data untuk perhitungan IKOTAN 2023 di lingkungan dunia usaha	2 instansi	PT. KAI, Shopee

Setelah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Penggiat P4GN dan Workshop Penggiat P4GN yang diselenggarakan oleh BNN Kota Surakarta, terdapat 10 Instansi Pemerintah dan 12 instansi di lingkungan pendidikan

yang berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta nilai IKP (Indeks Kemandirian Partisipatif) masing-masing instansi/lembaga di instansi pemerintah dan lingkungan pendidikan, dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Instansi/Lembaga	Lingkungan	Kegiatan P4GN	IKP	Kategori	Keterangan
1	Politeknik Indonusa	Lingkungan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi dalam kegiatan PKKMB - Regulasi P4GN tercantum dalam Tata tertib Mahasiswa 	3,02	B	Mandiri
2	Kelurahan Purwosari	Instansi Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah ada SK Kelurahan Bersinar - Anggaran untuk kegiatan Sosialisasi di PKK, Forum Anak, dan Karang Taruna, kegiatan olahraga, keagamaan dll - Ada norma sosial di masyarakat yang melarang penyalahgunaan narkoba 	3,84	A	Sangat Mandiri
3	Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta	Instansi Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Menyisipkan konten P4GN di Sekolah melalui program sekolah Adhiwiyata - Sosialisasi internal 	3,00	B	Mandiri
4	Dinas Kominfo SP Kota Surakarta	Instansi Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Pemutaran Mars BNN di radio Konata 	3,64	A	Sangat Mandiri

			<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi di radio bersama BNN - Menyediakan spanduk Kelurahan Bersinar di 54 Kelurahan - Insert Konten di media sosial 			
5	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kota Surakarta	Instansi Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Internal - Pemasangan media himbauan Bahaya Narkoba di lingkungan kantor 	2,64	B	Mandiri
6	Universitas Setia Budi Surakarta	Lingkungan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - UKM PIK-R yang aktif sosialisasi ke mahasiswa - Regulasi P4GN tercakup di Tata tertib mahasiswa - Sosialisasi saat PKKMB 	3,80	A	Sangat Mandiri
7	DP3AP2KB Kota Surakarta	Instansi Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilihan Duta Genre yang terdiri dari pelaksanaan tes urine dan pembekalan - Syarat anggota Duta Genre bersih narkoba - Sosialisasi di PIK-R 	3,84	A	Sangat Mandiri
11	BKPSDM Kota Surakarta	Instansi Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi pada Latsar CPNS - Tes Urine pada ASN 	3,84	A	Sangat Mandiri
12	Bakesbangpo I Kota Surakarta	Instansi Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dalam pelaporan Inpres - Sosialisasi ke OPD 	3,76	A	Sangat Mandiri

			<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan standing banner yang dibagikan ke sekolah-sekolah SMP - Penyusunan RAN P4GN 			
13	Dinas Kesehatan Kota Surakarta	Instansi Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Penunjukan layanan wajib lapor narkoba (faskes) - Kerja sama sosialisasi dengan pukesmas di wilayah - Insert konten P4GN di pameran Hari Kesehatan 	3,52	A	Sangat Mandiri
14	Satpol PP Kota Surakarta	Instansi Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Pemasangan spanduk - Operasi ke kos-kosan - Sosialisasi pada masyarakat dan Linmas 	3,04	B	Mandiri
15	KONI Surakarta	Instansi Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Menyampaikan informasi P4GN kepada anggota KONI yang terbagi di berbagai cabang olahraga 	2,60	B	Mandiri
16	Institut Seni Indonesia	Lingkungan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Tes Urine - Sosialisasi PKKMB 	3,68	A	Sangat Mandiri
17	UNIBA Surakarta	Lingkungan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat GAMAN UNIBA - Sosialisasi dalam PKKMB 	3,32	B	Mandiri

			<ul style="list-style-type: none"> - Pemasangan poster anti narkoba - Terlibat dalam lomba band di BNNP Jawa Tengah 			
18	SMK Batik 2 Surakarta	Lingkungan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi di MPLS bekerjasama dengan pukesmas dan polsek - Menyisipkan konten P4GN di kegiatan keagamaan dan olahraga 	3,52	A	Sangat Mandiri
19	SMK Mandala Bhakti	Lingkungan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Kerjasama dengan Polsek dan Pukesmas - Menyisipkan materi di BK - Sosialisasi MPLS - Menyanyikan Mars BNN - Tata tertib di sekolah 	3,64	A	Sangat Mandiri
20	MAN 1 Surakarta	Lingkungan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Menyanyikan Mars BNN - Poster di lingkungan sekolah - Tata tertib di sekolah - Sosialisasi MPLS 	3,68	A	Sangat Mandiri
21	MTsN 2 Surakarta	Lingkungan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi MPLS - Menyanyikan Mars BNN - Kunjungan ke BNNK - Pembentukan satgas anti narkoba 	3,72	A	Sangat Mandiri

Berdasarkan hasil Indeks Kemandirian Partisipatif (IKP) di atas, didapatkan rata-rata nilai IKP di Instansi Pemerintah sebesar 3,37 dalam

			<ul style="list-style-type: none"> - Menyisipkan materi di kelas - Pemilihan duta anti narkoba 			
22	SMPN 27 Surakarta	Lingkungan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Memutarkan mars BNN di sekolah - Kelas 9 mendapat materi di kelas melalui guru - Membuat poster anti narkoba 	2,92	B	Mandiri
23	SMPN 17 Surakarta	Lingkungan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Menyisipkan materi P4GN di kelas - Sosialisasi MPLS - Memutarkan mars BNN 	3,44	A	Sangat Mandiri
24	SMPN 3 Surakarta	Lingkungan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Menyisipkan materi P4GN di kelas - Sosialisasi MPLS - Memutarkan mars BNN 	3,60	A	Sangat Mandiri
25	SMPN 7 Surakarta	Lingkungan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Menyisipkan materi P4GN di kelas - Sosialisasi MPLS - Memutarkan mars BNN 	3,32	A	Sangat Mandiri

kategori A (Sangat Mandiri) dan IKP di Lingkungan Pendidikan sebesar 3,47 dalam kategori A (Sangat Mandiri) Sedangkan, akumulasi rata-rata IKP BNN Kota Surakarta (Instansi Pemerintah dan Lingkungan Pendidikan) sebesar 3,42 termasuk dalam kategori A (Sangat Mandiri).

Sedangkan hasil monitoring dan evaluasi serta nilai IKP (Indeks Kemandirian Partisipatif) masing-masing instansi/lembaga di Lingkungan Masyarakat dan lingkungan Dunia Usaha/Swasta, dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Instansi/ Lembaga	Lingkungan	Kegiatan P4GN	IKP	Kategori	Keterangan
1	Kelurahan Setabelan	Lingkungan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi di pertemuan PKK - SK Kelurahan Bersinar sudah terbentuk 	2,68	B	Mandiri
2	Kelurahan Sondakan	Lingkungan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah ada SK Kelurahan Bersinar tetapi belum menganggarkan khusus P4GN - Sudah menyisipkan dalam kegiatan masyarakat seperti kegiatan keagamaan dan olahraga - Ada norma sosial di masyarakat yang melarang penyalahgunaan narkoba 	2,80	B	Mandiri
3	Kelurahan Tipes	Lingkungan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi di PKK, Karang Taruna - Sudah ada SK Kelurahan Bersinar 	3,68	A	Sangat Mandiri
4	Kelurahan Sudiroprajan	Lingkungan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Menyanyikan Mars BNN - Penganjuran Kelurahan Bersinar - Insert Konten P4GN pada Grebeg Sudiroprajan 	3,64	A	Sangat Mandiri

			- Pameran P4GN bersama BNNK			
5	Kelurahan Pucangsa wit	Lingkungan Masyarakat	- Sosialisasi di KTI dan PKK - Pemasangan spanduk - Insert konten P4GN di pertemuan RT	2,76	B	Mandiri
6	Kelurahan Gandekan	Lingkungan Masyarakat	- Sudah ada SK Kelurahan Bersinar Senam dan sosialisasi bersama BNN - Sosialisasi di Karang Taruna - Lomba mewarnai - Kirab Kebhinekaan	3,80	A	Sangat Mandiri
7	Kelurahan Gilingan	Lingkungan Masyarakat	- Sosialisasi di pertemuan PKK - SK Kelurahan Bersinar sudah terbentuk	2,84	B	Mandiri
8	Kelurahan Timuran	Lingkungan Masyarakat	- Sudah ada penggiat di RT/RW secara merata - Menyisipkan materi P4GN di kegiatan PKK - Pemasangan spanduk di wilayah	3,68	A	Sangat Mandiri
9	Kelurahan Joyotakan	Lingkungan Masyarakat	- Sudah ada SK Kelurahan Bersinar - IBM masih aktif - Sosialisasi di masyarakat - Pelatihan Penggiat	3,84	A	Sangat Mandiri

10	Kelurahan Baluwarti	Lingkungan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - AP/IBM masih aktif menyisipkan materi di masyarakat - Sudah ada SK Kelurahan Bersinar - Masih ada kegiatan ronda dan keamanan rutin 	3,04	B	Mandiri
11	Kelurahan Semanggi	Lingkungan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Penggiat aktif di masyarakat - Pentas seni dalam rangka HANI - Penjangkauan ke klien - Membantu masyarakat yang membutuhkan pendampingan 	3,60	A	Sangat Mandiri
12	Kelurahan Jebres	Lingkungan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah ada SK Kelurahan Bersinar - Penggiat menyisipkan dalam kegiatan Karang Taruna - Sosialisasi kepada Karang Taruna, masyarakat - Siskamling 	2,84	B	Mandiri
12	PMI	Lingkungan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi pada anggota PMR di SMA Surakarta - Menyisipkan konten P4GN dalam kegiatan KSR 	3,00	B	Mandiri
13	IPM Surakarta	Lingkungan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Menyampaikan pada anggota 	3,00	B	Mandiri

			- Membuat materi yang akan dibagikan			
14	IPNU Surakarta	Lingkungan Masyarakat	- Menyampaikan pada anggota	2,60	B	Mandiri
15	Metta FM	Lingkungan Dunia Usaha/ Swasta	- Menyisipkan materi dalam siaran - Sosialisasi internal	2,76	B	Mandiri
16	PT. KAI	Lingkungan Dunia Usaha/ Swasta	- Pemasangan spanduk - Sosialisasi Internal - Tes urine bagi masinis	2,64	B	Mandiri
17	Solopos FM	Lingkungan Dunia Usaha/ Swasta	- Menyisipkan konten P4GN dalam bentuk Talkshow Radio dan Podcast	2,84	B	Mandiri
18	Solo Radio	Lingkungan Dunia Usaha/ Swasta	- Sosialisasi internal - Iklan layanan masyarakat - Menyisipkan saat siaran	3,04	B	Mandiri
19	Angkasa Pura I	Lingkungan Dunia Usaha/ Swasta	- Sosialisasi pada pegawai - Menyisipkan pada media sosial - Blast area Check In, - Tersedia detector narkoba - Rencana perpanjangan MoU dengan BNNK Surakarta	3,68	A	Sangat Mandiri

Berdasarkan hasil Indeks Kemandirian Partisipatif (IKP) di atas, didapatkan rata-rata nilai IKP di Lingkungan Masyarakat sebesar 3,15 dalam kategori B (Mandiri) dan IKP di Lingkungan Dunia Usaha/swasta sebesar 3,00 dalam kategori B (Mandiri) Sedangkan, akumulasi rata-rata IKP BNN Kota Surakarta (Instansi Pemerintah dan Lingkungan Pendidikan,

Lingkungan Masyarakat dan Lingkungan Dunia Usaha) sebesar 3,27 termasuk dalam kategori A (Sangat Mandiri).

Dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat anti narkoba terdapat kegiatan Tes Urine. Kegiatan Tes Urine dilaksanakan sebanyak 6 kali dengan anggaran DIPA dan 10 kali dengan anggaran Non DIPA. Berikut pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat melalui Tes Urine di Tahun 2023:

No	Tanggal	Sasaran	Kegiatan	Lingkungan	Jumlah Peserta
1.	6 Maret 2023	Kelurahan Sudiroprajan	Non DIPA	Masyarakat	25 orang
2.	8 Maret 2023	Rutan Kelas IIB Boyolali	Non DIPA	Instansi Pemerintah	72 orang
3.	9 Maret 2023	PT. Abhirama Kresna	Non DIPA	Instansi Swasta	25 orang
4.	17-18 April 2023	Pengemudi dan Kru Angkutan Umum di Terminal Tirtonadi	Non DIPA	Instansi Swasta	137 Orang
5.	4 Mei 2023	Pegawai ISI Surakarta	Non DIPA	Instansi Pendidikan	36 orang
6.	11 Mei 2023	Rutan Kelas IIB Boyolali	Non DIPA	Instansi Pemerintah	45 orang
7.	6 Juli 2023	Finalis Duta Genre	Non DIPA	Lingkungan Pendidikan	20 orang
8.	6 Agustus 2023	Finalis Putra putri SolP	Non DIPA	Lingkungan Swasta	20 orang
9.	15 Agustus 2023	Pegawai Kanwil DJP Jateng II	Non DIPA	Intansi Pemerintah	130 orang
10.	18 September 2023	Pegawai KPP Pratama Sukoharjo	Non DIPA	Intansi Pemerintah	141 orang
11.	17 dan 20 November 2023	ASN Pemkot Surakarta	DIPA	Instansi Pemerintah	50 Orang
12.	23 November 2023	Anggota DPRD Kota Surakarta	DIPA	Instansi Pemerintah	39 Orang
13.	28 November 2023	Kelurahan Setabelan	DIPA	Instansi Pemerintah	31 Orang
14.	1 Desember 2023	Sopir BST dan ASN Dinas Perhubungan Kota Surakarta	DIPA	Instansi Pemerintah	45 Orang
15.	4 Desember 2023	ASN Dinas Sosial Kota Surakarta	DIPA	Instansi Pemerintah	70 orang
16.	21 Desember 2023	Tempat Hiburan Malam di Kota Surakarta	DIPA	Masyarakat	30 orang

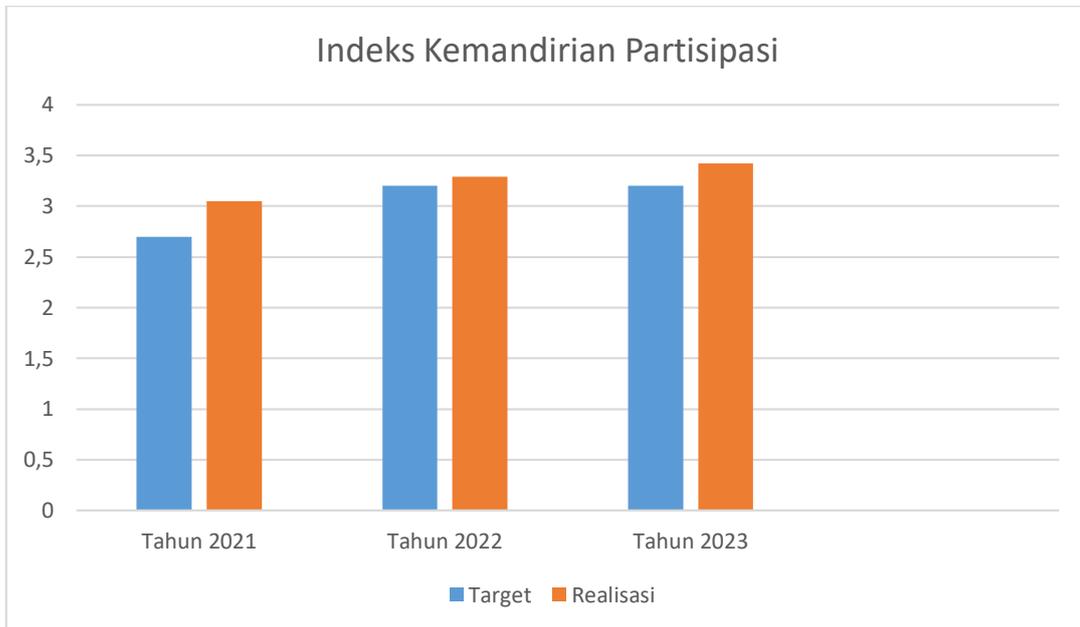
2. Kendala

- Penggiat Anti Narkoba di Instansi Pemerintah dan Lingkungan Pendidikan menyatakan bahwa peningkatan kapasitas dalam bentuk Bimbingan Teknis dan Workshop yang dilaksanakan 1 kali dirasakan kurang sehingga membutuhkan program pendampingan penggiat yang lebih komprehensif. Selain itu, Penggiat Anti Narkoba juga membutuhkan dukungan media P4GN yang dapat digunakan dalam kegiatan-kegiatan di lingkungannya;
- Bahasa yang digunakan dalam kuesioner IKP kurang mudah dipahami oleh responden;
- Variabel dalam kuesioner IKP kurang sesuai dengan sasaran responden (Masyarakat, Swasta dan Pendidikan), sebagai contoh responden instansi pemerintah tetapi item pertanyaan dari variabel ketahanan keluarga;
- Link kuesioner IKOTAN baru diberikan pada awal bulan Desember dan tenggat waktu pengumpulan data hanya 5 hari dengan target 200 responden dengan sasaran yang berbeda (Pemerintah, Pendidikan, Dunia Usaha, Masyarakat, Keluarga) sehingga cukup menjadi kendala dalam berkoordinasi ke instansi sasaran (penyiapan administrasi surat permohonan dll).
- BNNK tidak memiliki akses untuk memonitor jumlah responden yang sudah berhasil menyelesaikan kuesioner sehingga perlu memantau dan bergerak cepat agar target 200 orang responden terpenuhi.

3. Strategi

- Bagi penggiat P4GN agar melaksanakan rencana aksi P4GN dengan memaksimalkan kegiatan melalui melalui insert konten di instansi;
- Harus disediakan media P4GN bagi Penggiat Anti Narkoba sebagai modal untuk melaksanakan sosialisasi di lingkungannya;
- Dilaksanakan pembinaan lanjutan bagi penggiat P4GN yang telah terbentuk ditahun sebelumnya agar keberlanjutan program terus berjalan;
- Selalu berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam sinergi P4GN;
- Pendampingan dalam pengisian data IKP bagi responden;
- Selalu memantau update data IKOTAN untuk memonitor terpenuhinya jumlah responden.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 3,2 persentase 105,23% dapat terealisasi dengan skor sebesar 3,42 termasuk dalam kategori sangat mandiri. Apabila dibandingkan dengan capaian Indeks Kemandirian Partisipasi pada tahun 2021 dan 2022, maka pada tahun ini mengalami kenaikan seperti yang dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Upaya Pemulihan Penyalahguna dan/atau pecandu narkoba
-------------------------	--

Sasaran Kinerja di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
4.	Presentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	70	83,33	119,05

Definisi Operasional Presentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup yaitu menghitung presentase kenaikan kualitas hidup klien dengan membandingkan nilai awal dan akhir pengukuran WHOQoL WHOQoL-BREF (*World Health Organization Quality of Life Best References*) yang mengukur 4 domain kehidupan yaitu fisik, psikologis, lingkungan dan hubungan sosial.

Adapun pengukuran indikator “Presentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup” dilakukan dengan wawancara menggunakan instrumen WHOQoL-BREF (*World Health Organization Quality of Life Best References*) yang mengukur 4 domain kehidupan yaitu fisik, psikologis, lingkungan dan hubungan sosial dilakukan sebanyak 2 kali yaitu pada saat awal mengikuti layanan rehabilitasi dan pascarehabilitasi/bina lanjut, lalu menghitung presentase kenaikan angka kualitas hidup klien dengan membandingkan nilai awal dan akhir pengukuran WHOQoL-BREF.

Indikator Kinerja ini merupakan indikator yang baru tercantum dalam perjanjian kinerja Tahun 2023 ini sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya.

➤ **FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN DAN PENDUKUNG KEGAGALAN**

1. Faktor pendukung keberhasilan :

- a. Klien mengikuti layanan rehabilitasi berkelanjutan hingga selesai;
- b. Klien mengisi instrumen WHOQoL-BREF (*World Health Organization Quality of Life Best References*) sebanyak 2 kali yaitu pada saat awal mengikuti layanan rehabilitasi dan pascarehabilitasi/bina;
- c. Domain fisik memiliki skor 88,89%, domain psikologis dengan skor 77,78%, domain sosial dengan skor 77,78% dan domain lingkungan dengan skor 88,89%

Kegiatan yang mendukung terpenuhinya capaian (di BNNK Surakarta) yaitu Layanan Pascarehabilitasi dengan kegiatan melakukan pemantauan dan pendampingan klien pascarehabilitasi, baik klien rawat jalan BNNK maupun klien IBM.

2. Faktor Pendukung Kegagalan :

Belum dilakukan pengukuran kualitas hidup yang ke-2, dikarenakan klien belum selesai mengikuti layanan rehabilitasi;

➤ **KENDALA**

- a. Klien tidak konsisten dalam kedatangan untuk mengikuti layanan rehabilitasi;
- b. Ada kegiatan-kegiatan diluar kegiatan rehabilitasi yang mengganggu jadwal klien untuk rehabilitasi.

➤ **Upaya yang dilakukan :**

- a. Membuat kesepakatan diluar jadwal;
- b. Menghubungi keluarga/mengingatkan klien tentang jadwal rehabilitasi;

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi
-------------------------	---

Sasaran Kinerja di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
5.	Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang terlatih	10	10	100%

Definisi Operasional Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih yaitu jumlah masyarakat (Agen Pemulihan) yang telah mendapatkan pelatihan teknis rehabilitasi dan bertugas menyelenggarakan operasional dan layanan unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM).

Adapun pengukuran indikator “Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih” dilakukan dengan cara mendata dan memberikan pelatihan teknis rehabilitasi kepada petugas Agen Pemulihan yang telah mendapatkan SK penunjukan dari Kelurahan yang ditunjuk sebagai lokasi program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM).

Indikator Kinerja ini merupakan indikator yang baru tercantum dalam perjanjian kinerja Tahun 2023 ini sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya

➤ **FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN DAN PENDUKUNG KEGAGALAN**

i. **Faktor pendukung keberhasilan :**

- a. Telah dilakukan rapat pembentukan unit IBM;
- b. Telah ada surat penetapan dari BNNK dan diterbitkan SK penunjukan dari Kelurahan.
- c. Petugas yang diberikan pelatihan berasal dari 5 orang IBM Sudiroprajan dan 5 orang IBM Setabelan.

ii. **Faktor Pendukung Kegagalan :**

Sulit menyamakan jadwal antara agen pemulihan dikarenakan adanya kesibukan agen pemulihan.

➤ **KENDALA**

Belum dapat menyamakan jadwal antara Petugas IBM dengan BNNK, terkendala dengan bulan Ramadhan.

➤ **Upaya yang dilakukan :**

Koordinasikan dengan Petugas IBM terkait jadwal kegiatan.

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba
-------------------------	---

Sasaran Kinerja di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

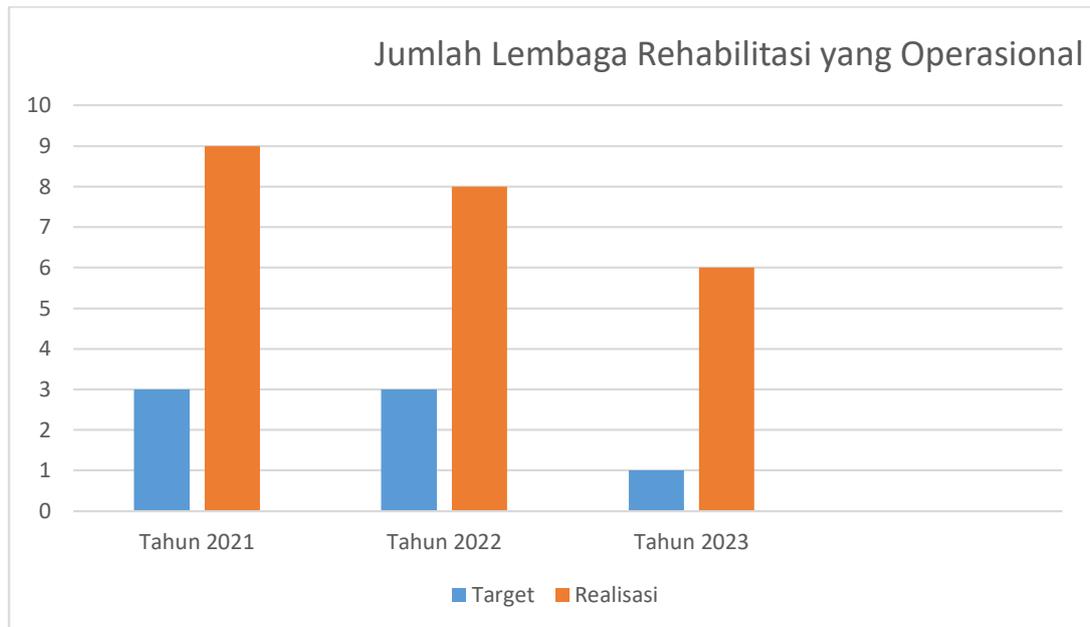
No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
6.	Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Operasional	1	6	600%

Definisi Operasional Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional yaitu jumlah lembaga yang telah bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional berdasarkan perjanjian kerjasama dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika tentang penetapan lembaga rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba baik lembaga rehabilitasi instansi pemerintah maupun lembaga rehabilitasi komponen masyarakat yang memperoleh peningkatan kemampuan dan telah melaksanakan rehabilitasi kepada klien pecandu dan atau korban penyalahgunaan narkoba.

➤ **PENGUKURAN INDIKATOR**

Adapun pengukuran indikator “Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional” dilakukan dengan cara mendata jumlah lembaga rehabilitasi narkoba yang memiliki PKS dengan BNN dan operasional memberikan layanan dalam satu tahun anggaran.

Perbandingan jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional pada tahun 2021 hingga 2023 dapat kita lihat pada tabel berikut:



➤ **FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN DAN PENDUKUNG KEGAGALAN**

1. Faktor pendukung keberhasilan :

- a. Ada 5 (lima) lembaga rehabilitasi yang bekerjasama dengan BNNK Surakarta dan operasional, yaitu RSUD dr. Moewardi, , RSJD dr. Arif Zainuddin Surakarta, Klinik Imron Medika, Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa, Yayasan Anargya Sober House;
- b. Dukungan dari Pemerintah Kota Surakarta perihal penerbitan Ijin operasional Klinik Pratama Rehabilitasi BNNK Surakarta Ngudi Waras dan membuka layanan rehabilitasi rawat jalan;
- c. Petugas rehabilitasi baik di lembaga rehabilitasi di klinik BNNK Surakarta telah diberi peningkatan kemampuan, sehingga layanan dapat berjalan sesuai ketentuan.

Beberapa kegiatan yang mendukung terpenuhinya capaian (di BNNK Surakarta) :

- a. Lembaga Rehabilitasi yang Operasional
 - 1) Koordinasi Kelembagaan.
 - 2) Bimbingan teknis Lembaga

3) Monitoring dan evaluasi

2. Faktor Pendukung Kegagalan :

- a. Kurangnya klien yang mengakses layanan rehabilitasi;
- b. SDM yang belum terlatih;
- c. Sistem birokrasi untuk penerbitan PKS di LRIP terlalu rumit.

➤ **KENDALA**

- 1. Klien tidak konsisten dalam kedatangan untuk program rehabilitasi;
- 2. Kurangnya klien yang mengakses layanan;
- 3. Stigma negatif penyalahguna narkoba sehingga malu atau takut dalam mengakses layanan rehabilitasi sehingga pelayanan rehabilitasi tidak berjalan secara optimal.

➤ **Upaya yang dilakukan :**

- 1. Merekomendasikan peningkatan kemampuan kepada petugas rehabilitasi;
- 2. Melakukan koordinasi secara intensif terhadap Lembaga rehabilitasi.
- 3. Aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan program rehabilitasi penyalahgunaan narkoba

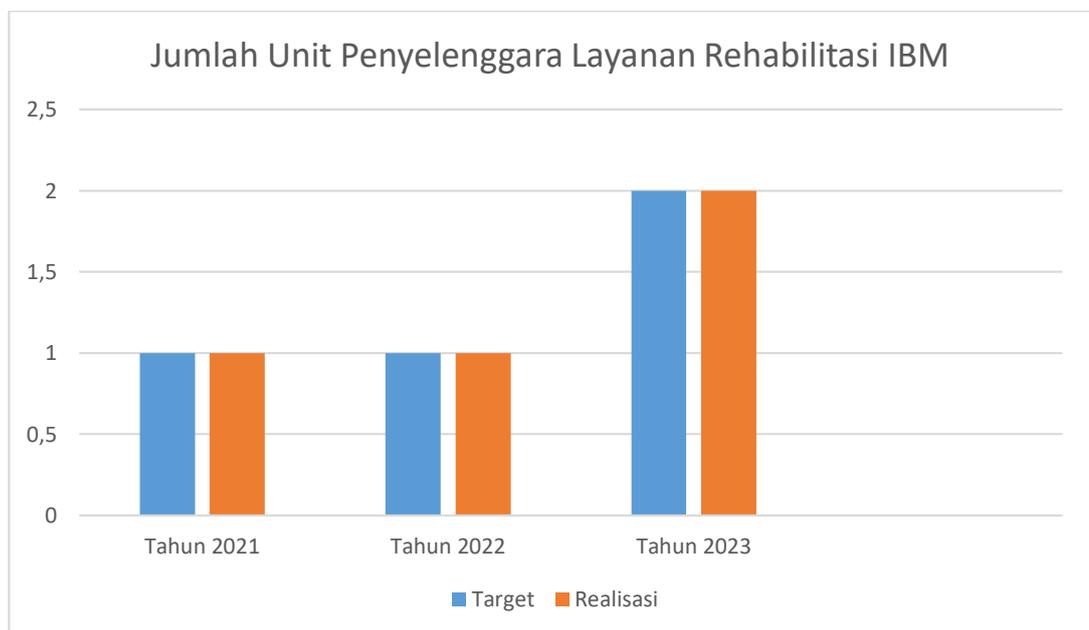
Selain mengukur Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Operasional, Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Aksesibilitas dan Kemampuan Fasilitas Layanan Rehabilitasi Narkotika” di atas juga diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
7.	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)	2	2	100%

Definisi Operasional Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional yaitu jumlah unit IBM yang dibentuk dan minimal telah melakukan kegiatan sosialisasi, pemetaan wilayah, penjangkauan dan skrining (fase 2) kepada korban penyalahgunaan narkoba di wilayah kerja masing-masing unit IBM.

Adapun pengukuran indikator “Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional” dilakukan dengan cara melakukan pembinaan, monitoring evaluasi secara berkala kepada unit IBM yang telah dibentuk menggunakan instrument yang sudah ditetapkan.

Perbandingan jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM yang operasional pada tahun 2021 hingga 2023 dapat kita lihat pada tabel berikut:



FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN DAN PENDUKUNG KEGAGALAN

1. Faktor pendukung keberhasilan :

- a. Adanya keterlibatan dan partisipasi aktif dari tokoh masyarakat dan kelurahan dalam mendukung program IBM;

- b. Adanya jejaring dengan stake holder terkait atau pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program IBM;
- c. Telah ada surat penetapan dari BNNK dan diterbitkan SK penunjukan dari Kelurahan.
- d. IBM yang operasional yaitu IBM Sudiroprajan dan IBM Setabelan.

2. Faktor Pendukung Kegagalan :

Kurangnya peran serta masyarakat terkait kegiatan IBM.

KENDALA

Kesibukan Agen Pemulihan dan klien, sehingga sulit menyamakan jadwal layanan.

Upaya yang dilakukan :

Melakukan rapat tim dan asistensi terkait jadwal kegiatan dan kegiatan yang telah diberikan terhadap klien.

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi
-------------------------	---

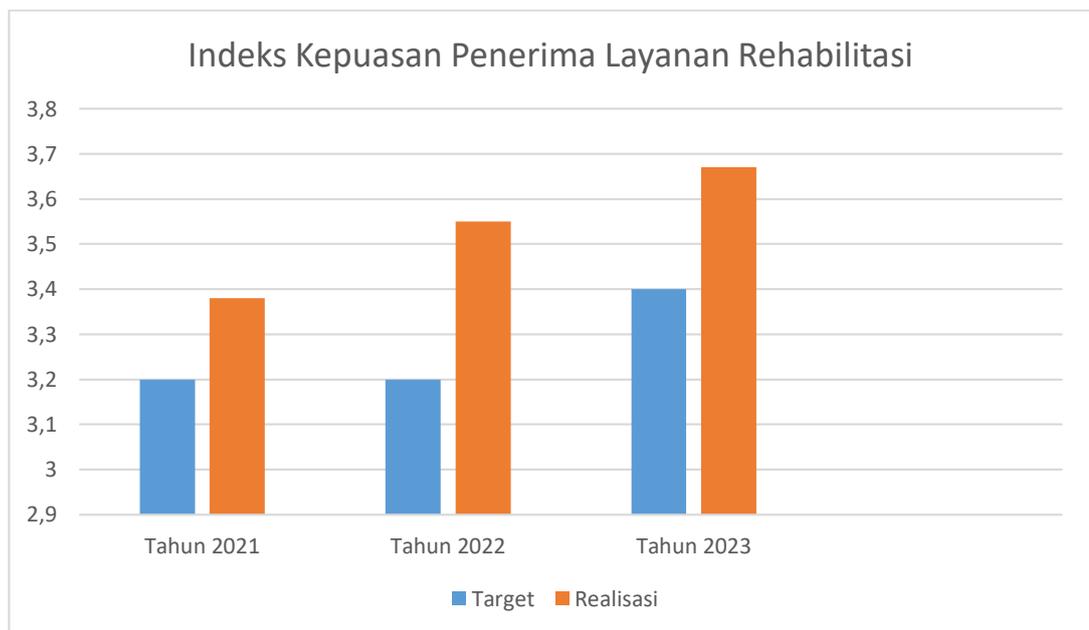
Sasaran Kinerja di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
8.	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,4	3,67	107,94%

Definisi Operasional Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi.

Adapun pengukuran indikator “Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi pada Fasilitas Rehabilitasi BNN” mengacu pada Permenpan

No 14 Tahun 2017 dengan menggunakan instrument kepuasan layanan yang telah ditetapkan, pengukuran dilakukan pada klien rehabilitasi rawat jalan baik rawat inap sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Perbandingan Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi pada Fasilitas Rehabilitasi BNN pada periode Tahun 2021 sampai Tahun 2023 dapat kita lihat pada grafik berikut:



➤ **FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN DAN PENDUKUNG KEGAGALAN:**

1. Faktor pendukung keberhasilan

Klien dalam proses layanan rehabilitasi selama 3 kali dapat mengisi survey kepuasan penerima layanan rehabilitasi.

2. Faktor pendukung kegagalan

Belum seluruhnya klien yang mengisi instrument kepuasan layanan, dikarenakan belum 3 kali layanan diberikan

➤ **Kendala :**

Responden/ klien kurang memahami dalam pengisian instrument sehingga petugas harus melakukan pendampingan untuk menjelaskan maksud dari kuesioner

➤ **Upaya yang dilakukan :**

Petugas memberikan penjelasan yang mudah untuk dipahami responden dalam pengisian kuesioner.

Selain indikator kerja yang tersebut diatas BNNK Surakarta memiliki program rehabilitasi yang tertuang dalam DIPA BNNK Surakarta. Kegiatan yang termasuk dalam DIPA BNNK Surakarta berupa rawat jalan, dan SKHPN.

Berikut capaian pelaksanaan program tersebut :

Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan di Klinik BNNK Surakarta

No	Wilayah	Target (orang)	Capaian (orang)	Selesai Program (orang)	Rujuk (orang)	DO (orang)	Proses Rehabilitasi (orang)
1	BNNK Surakarta	20	20	8	2	0	10

Layanan SKHPN di Klinik BNNK Surakarta

No	Instansi	SKHPN	
		Target	Realisasi
1	BNNK Surakarta	255	274

Sasaran	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan
Kegiatan	lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya

Sasaran Kinerja di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
9.	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	1	1	100%
	Pengawasan tahanan dan barang bukti	5	20	400%

Definisi operasional Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika adalah kegiatan Tim Pemberantasan BNN Kota Surakarta dalam upaya P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) dengan output satu berkas perkara tindak pidana narkotika. Kriteria satu berkas perkara tindak pidana narkotika tersebut adalah bila berkas sudah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan atau sering disebut (P21). Wilayah Surakarta yang menjadi wilayah utama Tim Pemberantasan BNN Kota Surakarta berbatasan dengan beberapa wilayah sebagai wilayah penyangga yang disebut dengan Keresidenan Surakarta (Surakarta, Karanganyar, Sragen, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali) sehingga penyelidikan tidak hanya berfokus di Kota Surakarta melainkan di Wilayah Keresidenan Surakarta.

Mengingat diterbitkannya Surat Kepala BNNP Jateng terkait zonasi yang menambah wilayah kerja BNNK Surakarta menjadi enam wilayah yaitu: Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Karanganyar, Sragen, dan Boyolali dan Wonogiri yang didalamnya mencantumkan TAT sebagai salah satu kegiatan di wilayah tersebut. Maka berkaitan dengan hal tersebut BNN Kota Surakarta telah melakukan koordinasi dan membuat SK terkait TAT untuk wilayah tersebut.

1. Hasil

- a. Pada Februari 2023 telah dilakukan penangkapan terhadap seseorang bernama Indra Gunawan dengan Laporan Kasus Narkotika Nomor: LKN/004-NAR/II/2023/BNN Kota Surakarta tanggal 07 Februari 2023. Adapun Berkas Perkara tersebut P-21 berdasarkan Surat Kejaksaan Negeri Sukoharjo Nomor: B-500/M.3.34/Enz.1/3/2023 tanggal 29 Maret 2023.

- b. BNN Kota Surakarta melaksanakan 20 layanan Assesmen Terpadu yang merupakan permohonan dari Polresta Surakarta, Polres Sragen, Polres Boyolali, Wonogiri, Polres Karanganyar, Polres Sukoharjo.

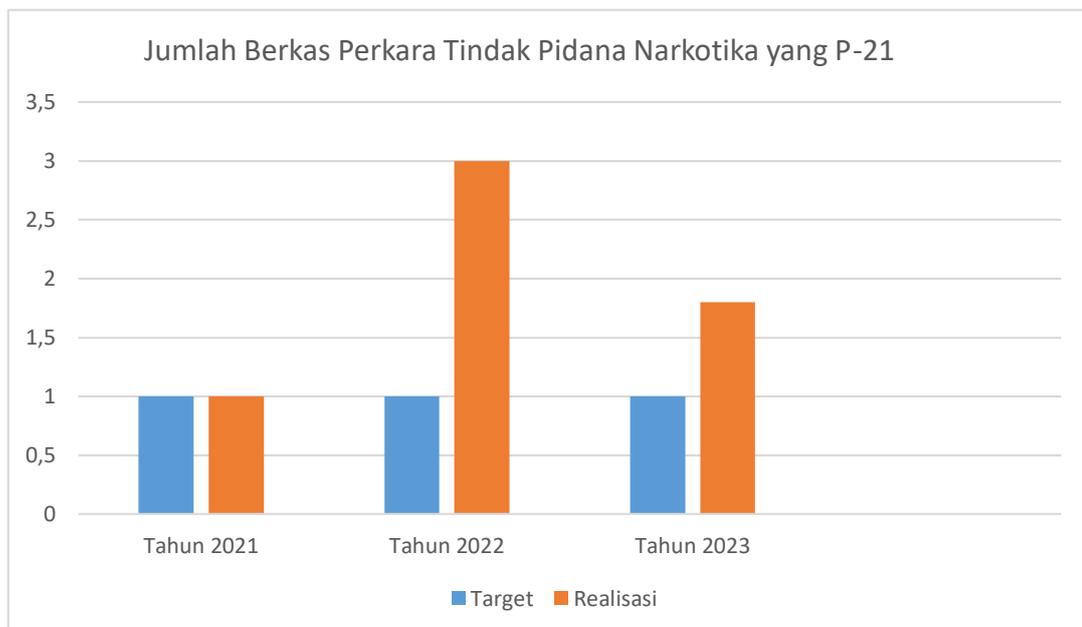
2. Kendala

- a. Masih belum lengkapnya Daftar Susunan Personil;
- b. Output TAT sudah melebihi target sehingga terkendala di anggaran. Mengingat adanya tambahan zonasi wilayah Kerja BNN Kota Surakarta.

3. Strategi

- a. Melakukan koordinasi dengan BNN Provinsi Jawa Tengah dan BNN RI;
- b. Melakukan koordinasi dengan berbagai instansi-instansi terkait.

Perbandingan Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21 periode Tahun 2021-2023 dapat kita lihat pada grafik berikut:



Sasaran Strategis	Terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien
--------------------------	--

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
10.	Nilai kinerja anggaran BNN	92	86,36	93,86%

Definisi operasional dari Nilai kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukan oleh Satuan Kerja BNN Kota Surakarta ke dalam aplikasi SMART Kementerian Keuangan. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan RKA-K/L.

Nilai Kinerja Anggaran diperoleh dari penilaian yang terdiri dari komponen capaian output, efisiensi, konsistensi penyerapan anggaran dan penyerapan anggaran. Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Surakarta pada tahun anggaran 2023 sebesar 93,48 (Kategori Sangat Baik) dengan hasil pengukuran terlampir.



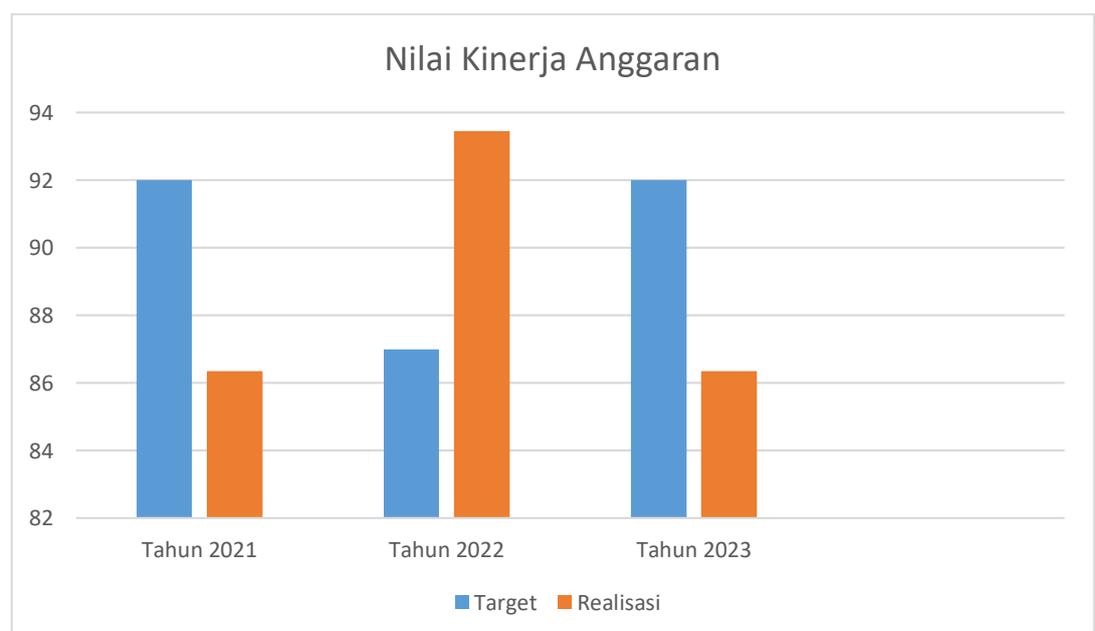
BNN Kota Surakarta pada tahun ini tidak dapat memenuhi target Nilai Kinerja Anggaran (NKA), dari target 92 diperoleh NKA sebesar 86,36%. Hal

tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya dikarenakan Penyerapan anggaran yang tinggi sesuai target yang telah ditentukan sebesar (98,7%) dengan tercapainya Capaian Rincian Output sesuai dengan target sehingga menyebabkan nilai pada komponen efisiensi menjadi rendah yang berdampak pada nilai kinerja anggaran secara keseluruhan

Beberapa output kegiatan BNNK Surakarta dimana realisasi melebihi target yakni pada Output TAT dan Lembaga Rehabilitasi yang Operasional, dimana target TAT sebanyak 5 terealisasi sebanyak 20 dan lembaga rehabilitasi yang operasional dari target 4 terealisasi sebanyak 6 lembaga dan Layanan SKHPN dari target 255 terealisasi sebesar 274.

Rekomendasi/ rencana aksi ke depan untuk dapat meningkatkan Nilai Kinerja Anggaran adalah semakin meningkatkan kinerja yang berpedoman pada perencanaan dan penganggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun perbandingan Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2021 sampai dengan 2023 dapat kita lihat pada grafik berikut:



Sasaran Strategis	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur
--------------------------	---

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
11.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Surakarta	92	96,11	104,46%

IKPA adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi pelaksanaan anggaran.

Pengawasan pengelolaan kinerja keuangan yang meliputi nilai IKPA meliputi kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Adapun elemen pengelolaan kinerja dan anggaran satuan kerja yang mempengaruhi nilai IKPA adalah sebagai berikut:

1. Revisi DIPA, dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA yang dilakukan oleh Satuan Kerja dalam satu triwulan
2. Deviasi Halaman III DIPA, dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana bulanan pada setiap jenis belanja.

3. Penyerapan Anggaran, dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap Triwulan.
4. Belanja Kontraktual, dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen rata-rata nilai kinerja aras ketepatan waktu penyampaian data perjanjian/ kontrak terhadap seluruh data perjanjian/kontrak yang didaftarkan ke KPPN; rata-rata nilai kinerja atas data perjanjian/ kontrak yang proses pengadaan dan perikatannya telah selesai sebelum tahun anggaran berjalan.
5. Penyelesaian Tagihan dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme Surat Perintah Membayar Langsung Kontraktual terhadap seluruh Surat Perintah Membayar Langsung Kontraktual yang diajukan ke KPPN.
6. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP). Uang Persediaan (UP) dihitung berdasarkan ketepatan waktu pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP tunai.
7. Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan penyampaian SPM melebihi batas waktu penyampaian SPM melebihi batas waktu.
8. Capaian Output dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian data capaian output dan nilai kinerja atas capaian RO.

Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Surakarta pada tahun anggaran 2023 sebesar 96,11 (Kategori Sangat Baik) dengan hasil pengukuran terlampir.

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM				
1	028	066	035665	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SURAKARTA	Nilai	100.00	85.78	96.65	0.00	0.00	99.77	80.00	100.00	76.89	80%	96.11
					Bobot	10	10	20	0	0	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	8.58	19.33	0.00	0.00	9.98	4.00	25.00			
					Nilai Aspek	92.89		92.14					100.00			

BNNK Surakarta pada tahun ini mendapatkan nilai IKPA melebihi target dengan kategori sangat baik, namun diharapkan pada tahun 2023 BNNK Surakarta dapat meningkatkan nilai IKPA dengan memperbaiki dan meningkatkan poin terutama pada komponen Deviasi Halaman III DIPA (Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan) dan memaksimalkan Capaian Output.

Adapun perbandingan Nilai IKPA pada periode Tahun 2021 sampai dengan 2023 dapat dilihat dari grafik berikut:



B. Realisasi Anggaran

Tahun 2023 BNN Kota Surakarta mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp.1.841.072.000** terdiri dari Pagu Awal Rupiah Murni sebesar **Rp. 1.810.912.000,-** dan PNBPN sebesar **Rp. 30.160.000,-**. Seiring dengan adanya revisi untuk Penambahan pagu PNBPN, maka Pagu akhir BNNK Surakarta menjadi sebesar **Rp. 1.890.072.000,-** dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar **Rp. 1.865.992.478-** persentase realisasi penyerapan anggaran sebesar **98,73%**.

NO	KODE NAMA SATKER	KETERANGAN	JENIS BELANJA										TOTAL
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAINLAIN	TRANSFER		
1	035665 BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SURAKARTA	PAGU	0	1,870,072,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,890,072,000
		REALISASI	0	1,845,992,478 (98.71%)	20,000,000 (100.00%)	0	0	0	0	0	0	0	1,865,992,478 (98.73%)
		SISA	0	24,079,522	0	0	0	0	0	0	0	0	24,079,522
GRAND TOTAL		PAGU	0	1,870,072,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,890,072,000
		REALISASI	0	1,845,992,478 (98.71%)	20,000,000 (100.00%)	0	0	0	0	0	0	0	1,865,992,478 (98.73%)
		SISA	0	24,079,522	0	0	0	0	0	0	0	0	24,079,522

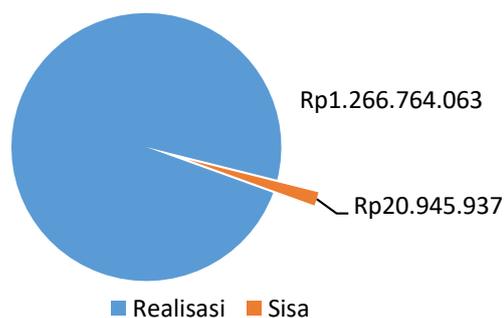
Anggaran BNN Kota Surakarta Tahun 2023 dialokasikan untuk mendukung 2 program yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dengan pagu sebesar Rp. 1.287.710.000,-

Dari pagu alokasi anggaran sebesar Rp. 1.287.710.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 1.266.764.063- (98,37%), sisa anggaran sebesar Rp. 20.945.937,- (1,67%).

Sisa anggaran tersebut di atas adalah sisa dari anggaran layanan perencanaan dan layanan perkantoran

Grafik Realiasi Anggaran Program Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya



2. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, dengan pagu sebesar Rp. 602.362.000,-

Dari pagu alokasi anggaran sebesar Rp. 602.362.000- telah terealisasi sebesar Rp. 599.228.415,- (99,48%), dengan sisa anggaran sebesar Rp. 3.133.585,- (0,52%).

Sisa anggaran tersebut di atas sebagian besar akibat disebabkan adanya sisa dari kegiatan layanan SKHPN yang sudah tidak dapat terserap.

Grafik Realisasi Anggaran Program Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba



BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja BNN Kota Surakarta Tahun 2023, merupakan perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan BNN Kota Surakarta sebagai pelayanan Publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa BNN Kota Surakarta telah berhasil merealisasikan berbagai kegiatan melalui program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dalam rangka mewujudkan Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2023-2024.

Capaian ini didukung melalui realisasi kinerja pilar-pilar BNN Kota Surakarta yaitu Tim Kerja Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Tim Kerja Rehabilitasi, Tim Kerja Pemberantasan dan Sub Bagian Umum serta pendukung lainnya yang berpengaruh terhadap pencapaian keberhasilan tugas BNN Kota Surakarta dalam pelaksanaan P4GN.

Capaian Kinerja BNN Kota Surakarta pada tahun 2023 menggunakan pengukuran kinerja berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja, target, realisasi, dan capaiannya. Ada 10 sasaran dan 11 Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja BNN Kota Surakarta Pada umumnya BNNK Surakarta telah melakukan kinerja secara maksimal.

Laporan kinerja ini mencerminkan akuntabilitas kinerja suatu organisasi yang harus memberikan informasi yang sesungguhnya atas meningkatnya atau kegagalan suatu capaian tersebut. Capaian kinerja BNN Kota Surakarta tahun 2023, telah dilakukan dengan berbagai upaya yang optimal untuk mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2023-2024.